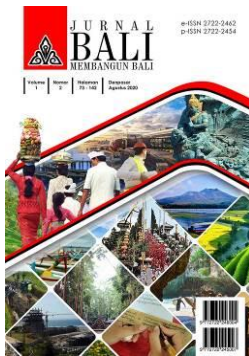




## Analisis Faktor dalam Penerapan *Good Corporate Governance* pada Pemerintah Desa Tista, Buleleng

I Made Deby Triaska Putri<sup>a</sup>, Desak Nyoman Sri Werastuti<sup>a</sup>,  
I Made Dwita Atmaja<sup>a</sup>, I Gusti Ayu Purnamawati<sup>a</sup>  
<sup>a</sup>Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

email: [debytriaska@student.undiksha.ac.id](mailto:debytriaska@student.undiksha.ac.id)



### Sejarah Artikel

Diterima pada  
9 Januari 2026

Direvisi pada  
26 Januari 2026

Disetujui pada  
12 Maret 2026

### Abstrak

**Tujuan:** In this study, the author analyzes internal and external factors in the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the Tista Village Government, Buleleng Regency, Bali.

**Metode penelitian:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aparatur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode

**Hasil dan pembahasan:** Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat sistem pengendalian internal, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian Good Corporate Governance di sektor publik, khususnya pada tingkat pemerintahan desa.

**Implikasi:** Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat sistem pengendalian internal, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.

**Kata Kunci:** good corporate governance pemerintah desa akuntabilitas transparansi tata kelola publik

### Abstract

**Purpose:** The authors in this study, analyze internal and external factors in the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the Tista Village Government, Buleleng Regency, Bali.

**Research methods:** This research employs a qualitative case study design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving village government officials, members of the Village Consultative Body (BPD), and community representatives. Informants were selected using purposive sampling. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was ensured through source and method triangulation.

**Results and discussion:** The research results indicate that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the Tista Village Government has been ongoing, but is not yet fully optimal. Internal factors contributing to GCG implementation include the competence of village officials and leadership commitment. Meanwhile, external implementation-related factors include oversight by the Village Consultative Body (BPD), government regulations, and the level of community participation. Several GCG principles, particularly transparency and accountability, remain administrative in nature and are not fully participatory.

**Implication:** This study offers practical implications for village governments to strengthen human resource capacity, enhance internal control systems, and increase community participation in village financial management.

**Keywords:** good corporate governance; village government; accountability; transparency; public governance

## PENDAHULUAN

Pemerintahan desa memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Bali yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan tata kelola pemerintahan yang khas (Suarminiati & Subanda, 2025). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa memperoleh kewenangan yang semakin luas dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Kewenangan tersebut diikuti dengan peningkatan alokasi Dana Desa yang secara nasional terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, termasuk di wilayah Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng (Indarriyanti *et al.*, 2025).

Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Dana Desa secara nasional telah disalurkan dalam jumlah yang signifikan sejak tahun 2015, dengan tujuan utama mempercepat pembangunan desa, mengurangi kesenjangan wilayah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Di Provinsi Bali, dana desa menjadi salah satu sumber pendanaan utama bagi desa adat dan desa dinas dalam menjalankan program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal (Kementerian Desa, 2022). Kabupaten Buleleng sebagai wilayah dengan jumlah desa yang cukup besar di Bali Utara turut menerima alokasi dana desa dalam jumlah yang signifikan, sehingga menuntut adanya tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan (Wulandari & Al-Amin, 2025).

Namun demikian, peningkatan alokasi dana desa juga diiringi dengan berbagai permasalahan tata kelola (Qadri *et al.*, 2026). Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI) tahun 2024 dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa masih menjadi salah satu area yang rawan terhadap kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan yang sering muncul antara lain keterlambatan penyusunan laporan keuangan desa, kurangnya kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, serta rendahnya transparansi informasi keuangan kepada masyarakat (Khoir & Susanto, 2025). Kondisi ini mencerminkan bahwa penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa masih belum optimal (Suputra & Hendrayanti, 2020).

Dalam konteks tersebut, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi sangat relevan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola sektor publik yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Arrofi & Muhammad, 2025). Penerapan GCG pada pemerintah desa diharapkan mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa dana desa dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran (Rengganih *et al.*, 2025).

Secara empiris, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada pemerintah desa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal (Firmansyah & Mutmainnah, 2025). Faktor internal meliputi kompetensi sumber daya manusia aparatur desa, komitmen pimpinan desa, sistem pengendalian internal, serta budaya organisasi. Sementara itu, faktor eksternal mencakup regulasi pemerintah, pengawasan dari aparat pengawas

internal pemerintah (APIP), serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa (Firmansyah & Sinatria, 2025). Dalam perspektif teori tata kelola sektor publik dan teori keagenan, lemahnya salah satu faktor tersebut dapat berdampak langsung pada rendahnya kualitas penerapan GCG (Manossoh, 2016).

Di Kabupaten Buleleng, termasuk pada Pemerintah Desa Tista, dinamika pengelolaan keuangan desa menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten. Desa Tista sebagai salah satu desa yang aktif dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menghadapi tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi, seiring dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat dan pengawasan dari berbagai pihak. Kondisi ini menjadikan Desa Tista sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji faktor-faktor yang berperan dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada pemerintah desa (Kementerian Desa, 2022).

Penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota atau hanya mengkaji penerapan GCG secara parsial tanpa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya secara mendalam pada level desa. Selain itu, kajian empiris yang secara spesifik mengangkat konteks desa di Kabupaten Buleleng, khususnya Desa Tista, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menitikberatkan pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *Good Corporate Governance* pada pemerintah desa berdasarkan kondisi lokal dan karakteristik pembangunan daerah di Bali.

Untuk memperkuat fenomena penelitian dan memperoleh gambaran awal mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada Pemerintah Desa Tista, peneliti melakukan pengumpulan data awal kepada sejumlah informan kunci. Pengumpulan data awal ini bertujuan untuk memetakan persepsi umum informan terhadap penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Data awal tersebut digunakan sebagai bahan pemetaan fenomena dan penentuan fokus pendalaman data, yang selanjutnya dikaji secara lebih mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun gambaran awal persepsi informan terhadap penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada Pemerintah Desa Tista disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Gambaran Awal Persepsi Informan terhadap Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Pemerintah Desa Tista  
(Sumber: Penulis, 2025)

No.	Responden	Transpa ransi	Akuntab ilitas	Respon sibilitas	Independens i	Kewajaran
1	Kepala Desa	3	4	4	3	3
2	Sekretaris Desa	3	3	4	3	3
3	Kaur Keuangan	4	4	3	3	3
4	Kaur Perencanaa n	3	3	3	3	3

5	Perangkat Desa I	3	3	3	2	3
6	Perangkat Desa II	3	3	3	3	2
7	Anggota BPD I	4	3	3	3	3
8	Anggota BPD II	3	3	3	3	3
9	Tokoh Masyarakat I	3	3	3	3	3
10	Tokoh Masyarakat II	3	3	3	3	3

Keterangan: 4 = Sangat Setuju (SS); 3 = Setuju (S); 2 = Kurang Setuju (KS); 1 = Tidak Setuju (TS).

Berdasarkan hasil pemetaan awal sebagaimana disajikan pada Tabel 1. secara umum informan memberikan penilaian positif terhadap penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada Pemerintah Desa Tista. Meskipun demikian, hasil pemetaan tersebut menunjukkan adanya variasi persepsi antar prinsip tata kelola, khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Temuan awal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di Pemerintah Desa Tista telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal dan merata. Oleh karena itu, data awal ini tidak dianalisis secara statistik, melainkan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pendalaman kualitatif guna memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang berperan dalam penerapan *Good Corporate Governance* secara kontekstual sesuai dengan kondisi dan karakteristik Desa Tista.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang berperan dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada pemerintah desa, khususnya dalam konteks lokal Desa Tista, Kabupaten Buleleng. Metode studi kasus digunakan karena penelitian ini berfokus pada satu objek penelitian secara spesifik, sehingga memungkinkan peneliti menggali fenomena, proses, serta dinamika penerapan GCG secara komprehensif dan kontekstual.

### Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada Identifikasi dan Pemahaman faktor-faktor internal dan eksternal dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada Pemerintah Desa Tista, Faktor internal mencakup kompetensi sumber daya manusia aparatur desa, komitmen pimpinan desa, sistem pengendalian internal, serta budaya organisasi. Sementara itu, faktor eksternal meliputi regulasi pemerintah, pengawasan dari aparat pengawas internal pemerintah (APIP), serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan desa. Penerapan GCG dianalisis

berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

### **Responden Penelitian**

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan Desa Tista. Informan utama meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, serta perangkat desa lainnya yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat sebagai Informan pendukung untuk memperoleh perspektif eksternal terkait penerapan prinsip *Good Corporate Governance*.

### **Ukuran dan Penentuan Sampel**

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua pihak di Pemerintah Desa Tista memiliki keterlibatan langsung dan pemahaman yang memadai terkait penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Oleh karena itu, informan dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) Memiliki jabatan dan peran langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa, (2) terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, serta (3) memahami kebijakan dan regulasi terkait tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan kriteria tersebut, responden penelitian terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan tokoh masyarakat. Jumlah responden ditentukan secara fleksibel hingga data yang diperoleh mencapai tingkat kejenuhan informasi (data saturation), sehingga mampu menggambarkan secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *Good Corporate Governance* pada Pemerintah Desa Tista.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara terpadu melalui beberapa metode, yaitu: (1) Wawancara mendalam, yang dilakukan secara langsung kepada informan utama dan pendukung untuk menggali informasi terkait penerapan GCG dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. (2) Observasi, dengan mengamati secara langsung proses pengelolaan keuangan desa, mekanisme pelayanan publik, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Desa Tista. (3) Dokumentasi, dengan mengkaji dokumen-dokumen resmi desa seperti APBDes, laporan pertanggungjawaban keuangan, peraturan desa, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dengan cara mengelompokkan

informasi berdasarkan fokus penelitian dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan untuk mengidentifikasi, faktor-faktor internal dan eksternal yang berperan dalam penerapan GCG pada Pemerintah Desa Tista. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan terhadap aparatur Pemerintah Desa Tista, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat, diperoleh gambaran bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada tingkat desa telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Penerapan prinsip-prinsip GCG menunjukkan variasi antar aspek, yang dipengaruhi oleh faktor internal organisasi desa maupun faktor eksternal lingkungan sosial masyarakat.

Dari aspek transparansi, Pemerintah Desa Tista telah melakukan upaya keterbukaan informasi melalui penyampaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta realisasi anggaran kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa dan media informasi desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian Halid *et al.*, (2025) yang menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa umumnya telah dijalankan secara formal melalui publikasi APBDes, namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan pemahaman masyarakat secara substantif. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi keuangan desa belum sepenuhnya mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini memperkuat temuan Atuna *et al.*, (2025) yang menyimpulkan bahwa transparansi di tingkat desa sering kali masih bersifat administratif, sehingga partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa belum optimal.

Pada aspek akuntabilitas, Pemerintah Desa Tista telah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Atuna *et al.* (2025) dan Halid *et al.* (2025) yang menemukan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas di organisasi desa telah berjalan melalui penyusunan laporan keuangan, namun sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia aparatur desa. Ketergantungan terhadap aparatur tertentu dalam penyusunan laporan keuangan, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, juga sejalan dengan temuan Hasanah *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa keterbatasan kompetensi aparatur desa menjadi faktor penghambat utama dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa yang berkelanjutan.

Aspek responsibilitas menunjukkan bahwa aparatur desa telah memahami kewajiban melaksanakan tugas sesuai regulasi yang berlaku. Temuan ini mendukung penelitian Megasyara & Imawan (2023) yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap regulasi menjadi dasar utama penerapan GCG di tingkat desa. Namun demikian, keterbatasan pemahaman teknis terhadap perubahan regulasi yang cepat, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, juga sejalan dengan hasil penelitian Hidayat & Mulyani (2021) yang menegaskan bahwa kurangnya pelatihan berkelanjutan menyebabkan aparatur desa kesulitan menyesuaikan diri dengan dinamika kebijakan pengelolaan keuangan desa.

Dari sisi independensi, mekanisme musyawarah desa yang melibatkan BPD telah menjadi sarana utama dalam pengambilan keputusan strategis desa. Temuan ini konsisten dengan penelitian Setiawan & Hariri (2024) yang menekankan bahwa forum musyawarah desa berperan penting dalam menjaga independensi keputusan pemerintah desa dari intervensi eksternal. Namun demikian, kedekatan sosial dan hubungan kekeluargaan yang masih kuat di lingkungan desa berpotensi memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan penelitian Tohawi (2025) yang menyatakan bahwa faktor budaya dan sosial lokal dapat menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan prinsip independensi pada pemerintahan desa.

Sementara itu, aspek kewajaran tercermin dari upaya pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan program pembangunan yang merata bagi masyarakat. Pada dasarnya kewajaran di tingkat desa erat kaitannya dengan distribusi manfaat pembangunan dan pelayanan publik. Namun, partisipasi masyarakat yang belum merata dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa menunjukkan bahwa prinsip kewajaran belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Saragih & Alpi (2023) yang menegaskan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dapat menghambat terwujudnya keadilan dan kesetaraan dalam tata kelola pemerintahan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada Pemerintah Desa Tista adalah hasil dari kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dominan meliputi kompetensi sumber daya manusia aparatur desa dan komitmen pimpinan desa. Temuan ini sejalan dengan teori tata kelola sektor publik yang menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, sistem pengendalian internal berperan penting dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Ketergantungan pada aparatur tertentu dalam penyusunan laporan keuangan menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal belum sepenuhnya berjalan secara kolektif dan terstruktur. Kondisi ini mendukung temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal dapat menghambat penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di sektor publik.

Dari sisi faktor eksternal, pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas penerapan GCG. Meskipun mekanisme pengawasan formal telah tersedia, partisipasi masyarakat yang masih relatif pasif menunjukkan bahwa penerapan GCG di tingkat desa tidak hanya bergantung pada regulasi dan struktur organisasi, tetapi juga pada kesadaran dan keterlibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Jika dikaitkan dengan teori keagenan, pemerintah desa bertindak sebagai agen yang mengelola sumber daya publik atas nama masyarakat sebagai prinsipal. Ketidakseimbangan informasi dan keterbatasan pengawasan berpotensi menimbulkan permasalahan tata kelola. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten menjadi kunci untuk meminimalkan konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Secara keilmuan, hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian *Good Corporate Governance* pada sektor publik tingkat desa, khususnya dalam konteks pembangunan daerah di Provinsi Bali. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan GCG di pemerintahan desa tidak dapat dilepaskan dari faktor internal organisasi dan faktor eksternal lingkungan sosial masyarakat desa.

Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur tata kelola pemerintahan desa dengan menghadirkan bukti empiris berbasis studi kasus di Desa Tista, Kabupaten Buleleng, yang masih relatif terbatas dalam penelitian sebelumnya. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan model penerapan Good Corporate Governance yang lebih kontekstual dan berkelanjutan pada pemerintahan desa.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Pemerintah Desa Tista telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran masih dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dominan meliputi kompetensi sumber daya manusia aparatur desa, komitmen pimpinan desa, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Sementara itu, faktor eksternal yang berpengaruh antara lain peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), partisipasi masyarakat, serta kondisi sosial budaya desa.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memfokuskan kajian pada pengaruh masing-masing faktor internal dan eksternal secara lebih spesifik terhadap setiap prinsip *Good Corporate Governance*, seperti pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas atau peran partisipasi masyarakat terhadap transparansi pemerintahan desa. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji strategi penguatan kapasitas aparatur desa dan optimalisasi peran BPD serta masyarakat sebagai upaya peningkatan penerapan GCG yang lebih efektif dan berkelanjutan pada pemerintahan desa.

## REFERENSI

- Arrofii, D. Y. T., & Muhammad, S. A. (2025). Implementasi prinsip good corporate governance dalam pencegahan tindak pidana korupsi di BUMN. *Padjajaran Law Review*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.56895/plr.v13i1.2210>.
- Atuna, P., Hamim, U., & Abdussamad, J. (2025). Transparansi Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(9), 65–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15320797>.
- Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI). (2024). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Pusat Tahun 2023. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Pusat Tahun 2023*, i–162.
- Firmansyah, F., & Mutmainnah. (2025). Analisis Penerepan Prinsip Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Menulis : Jurnal Penelitian Nusantara. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12), 575–585. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i12.821>.
- Firmansyah, H., & Sinatria, N. (2025). Peran Inspektorat Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance. *JIA : Jurnal Akuntansi Aisyah*, 6(1), 1–11. <https://journal.aisyahuniversity.ac.id/index.php/JAA/article/view/1925>
- Halid, F., Amaliah, T. H., & Mahdalena. (2025). Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Desa : Sintesis Tematik Literatur. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam (SEBI)*, 7(2), 199–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/sebi.v7i2.4859>
- Hasanah, S., Nurhayati, E., & Purnama, D. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 17–27. <https://doi.org/10.18196/rab.040149>
- Indarriyanti, H., Masrunik, E., Wahyudi, A., & Mustofa, I. (2025). *Akuntansi Sektor Publik*.

- Kementerian Desa. (2022). Wamendes: Bukan Indonesia Majukan Desa, Tetapi Desa Memajukan Indonesia. *Kemendesa.Go.Id*, 6–9. <https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/4217/#:~:text=Wamen Budi Arie menjelaskan%2C ukuran desa digital sangat,website desa baru 21.000 desa dari 74.961 Desa.>
- Khoir, A., & Susanto, F. (2025). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Ngraseh. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(4), 273–292. <https://doi.org/10.24034/jjaku.v4i4.7508>
- Manossoh, H. (2016). Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan, PT Norlive Kharisma Indonesia : Bandung. In Irma Wulansari (Ed.), *PT Norlive Kharisma Indonesia (Pertama)*. [https://repo.unsrat.ac.id/1133/1/Buku-Good\\_corporate\\_governance\\_untuk\\_meningkatkan\\_kualitas\\_laporan\\_keuangan.pdf](https://repo.unsrat.ac.id/1133/1/Buku-Good_corporate_governance_untuk_meningkatkan_kualitas_laporan_keuangan.pdf)
- Megasyara, I., & Imawan, A. (2023). Implementasi Good Government Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 13(2), 512–528. <https://doi.org/10.22219/jrak.v13i2.23525>
- Qadri, U. L., Astuti, A., & Adhitya, T. R. (2026). Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 19(1), 1–9. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v19i1.990>
- Rengganih, R., Kharisma, A. S., Wulandari, H. K., & Dumadi. (2025). Pengaruh Good Governance , Kompetensi Aparat Desa , dan Pengawasan terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa ( Studi Empiris Desa se Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes ). *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(1), 363–375. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i1.2749>
- Saragih, D. P., & Alpi, M. F. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Tata Kelola Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabiilitas Sebagai Intervening. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i1.3842>
- Setiawan, R. B., & Hariri, A. (2024). Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan Sistem Pengawasan Pemerintahan Desa. *Pagaruyuang Law Journal*, 7(2), 383–401. <https://doi.org/10.30649/Phj.V16i2.65>
- Suarminiati, N. M., & Subanda, I. N. (2025). Merajut SDGs dalam Bingkai Budaya : Reformasi Birokrasi Berbasis Warisan Lokal Bali. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 14(3), 443–455. <https://doi.org/10.23887/jish.v14i3.97281>
- Suputra, I., & Hendrayanti, N. (2020). View of Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa.pdf. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2281–2295. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i09.p09>
- Tohawi, A. (2025). Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 10(1), 92–120. <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1445>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014*. Presiden Republik Indonesia.
- Wulandari, & Al-Amin. (2025). Transparansi Pengelolaan Dana Desa: Evaluasi Kebijakan Dan Implementasi. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), 208–218.